

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan sektor agraris memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta jiwa dengan hampir separuhnya bekerja di sektor pertanian.¹ Luas lahan panen sektor pertanian (termasuk padi dan palawija) pada tahun 2018 mencapai 23.884 Ha dan total produksi sebanyak 136.193 ton.² Pertumbuhan pada sektor pertanian yang membaik tentunya mampu mendongkrak dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2013-2018, total akumulasi nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor pertanian Indonesia mencapai Rp1.375 triliun naik sekitar 47% jika dibandingkan dengan tahun 2013,³ sehingga peranan sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional perlu dijaga.

Produksi pada sektor padi mengalami tren peningkatan cukup signifikan, pada rentangan tahun 2014 hingga 2017 produksi padi tercatat dalam gabah kering giling (GKG) sebanyak 70,84 juta ton GKG, 75,39 juta ton GKG, 79,36 juta ton GKG, dan

¹ Kementerian Pertanian, "Sektor Pertanian Masih Menjadi Kekuatan Ekonomi di Indonesia", 2018, Diakses melalui <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2564>, pada 29/Agustus/2022.

² Kementerian Pertanian, "Data Lima Tahun Terakhir Produksi Padi Menurut Provinsi, 2014-2018", 2018, Diakses melalui <https://www.pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=61> pada 29/Agustus/2022

³ Kementerian Pertanian, "PDB Sektor Pertanian Terus Membaik", 2018, Diakses melalui <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3551> pada 29/Agustus/2022.

81,38 juta ton GKG pada tahun 2017.⁴ Pada periode selanjutnya angka produksi padi ini mengalami penurunan yang signifikan, hal ini dikarenakan akibat dari kemarau parah pada tahun 2018 beserta periode awal pandemi Covid-19 tahun 2020 yang menyebabkan tingkat produksi padi masyarakat menurun dari pembatasan kegiatan selama pandemi. Pada tahun 2018 tercatat produksi padi nasional hanya sebanyak 59,2 juta ton GKG dan pada tahun 2019-2020 sebanyak 54,6 juta ton GKG dan 55,53 juta ton GKG.⁵ Tentu angka ini menjadi catatan buruk bagi Indonesia terhadap peningkatan produksi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga pemerintah perlu berupaya dalam pemenuhan ketersediaan dan kebutuhan beras di Indonesia.

Kebijakan impor beras menjadi salah satu cara bagi pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan stok beras dalam negeri, hal ini juga dikarenakan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap beras cukup tinggi dibandingkan produk pangan lainnya, sehingga intensitas kuota impor ini fluktuatif dengan melihat dari situasi produksi nasional. Indonesia mengimpor beras dari beberapa negara produsen beras dan salah satu negara eksportir beras ini adalah Thailand. Pada tahun 2016, Indonesia melakukan impor beras dari negara Thailand sebanyak 558 ton beras, angka impor ini terus meningkat hingga tahun 2020 dengan total impor dari Thailand

⁴Kementerian Pertanian, “Kementan Optimistis Produksi Padi Terjaga Saat Kemarau”, 2018, Diakses melalui <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3334> pada 28/Oktober/2022.

⁵Lokadata, “Produksi Padi di Indonesia, 2014-2020” melalui <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/produksi-padi-di-indonesia-2014-2020-1602841946> pada 30/Oktober/2022.

sebanyak 88 5931,1 ton.⁶ Jika dilihat dari lima tahun sebelumnya pada tahun 2010 hingga 2015, Indonesia lebih banyak mengimpor beras dari Vietnam daripada Thailand, pada tahun 2010 dari Vietnam sebanyak 467 ton dan dari Thailand sebanyak 209 ton beras, selanjutnya pada tahun 2015 dari Vietnam sebanyak 509 ton beras dan dari Thailand sebanyak 127 ton beras. Pada tahun-tahun selanjutnya Indonesia sudah mulai beralih memilih Thailand sebagai pemasok beras impor utamanya dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam.⁷

Hubungan Indonesia dengan Thailand sudah lama terjalin, hubungan diplomatik antara Indonesia-Thailand mulai berlangsung sejak tanggal 7 Maret 1950. Dari kerja sama antara kedua negara ini terliput pada berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, iptek, dan budaya. Kerja sama dalam sektor perekonomian baru terjalin pada tahun 1992 dengan ditandatanganinya Persetujuan Kerja sama Ekonomi dan Teknik RI-Thailand yang membahas mengenai ekonomi, perdagangan, transportasi, pendidikan dan kebudayaan, investasi, perikanan, pariwisata, energi, kerja sama teknik, dan kerjasama IMT-GT.⁸ Kerja sama ini juga terkait dengan intensifnya Thailand nantinya sebagai eksportir beras utama bagi Indonesia.

Alasan perbedaan harga dari beras nasional dengan beras dari Thailand menjadi

⁶ Badan Pusat Statistik, “Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2000-2020”, 2021, Diakses melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2020.html> pada 01/Agustus/2022.

⁷ Fabian Pratama Kusumah, “Ekonomi Politik Dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019,” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 137.

⁸ Kemenlu RI, “Hubungan Diplomatik Indonesia-Thailand Berlangsung Kunjung antara Pemimpin Kedua Negara”, Diakses melalui <https://kemlu.go.id/bangkok/id/read/thailand/1813/> pada 25/Agustus/2022

salah satu langkah bagi Indonesia untuk melakukan impor beras guna menjaga pasokan dalam negeri serta mempertahankan harga beras agar tidak melambung tinggi, karena semakin tinggi harga beras lokal, maka semakin besar pula jumlah beras yang diimpor ke Indonesia, sebaliknya jika harga beras lokal rendah maka impor beras menurun.⁹ Hal ini juga terkait dengan pola perilaku masyarakat, ketika harga beras lokal itu naik tetapi harga beras impor turun pada saat yang sama, masyarakat lebih memilih untuk membeli beras impor yang relatif murah dibandingkan dengan beras lokal yang mahal, sehingga permintaan beras impor meningkat sedangkan permintaan beras domestik menurun.¹⁰ Keseimbangan harga ini perlu diperhatikan pemerintah dengan memerhatikan stok beras nasional dengan peredaran beras impor di Indonesia sehingga beras yang diedarkan kepada masyarakat ini tidak menjadi suatu permasalahan.

Ditambah lagi terjadinya penurunan rata-rata konsumsi per kapita seminggu terhadap beras setiap tahunnya, jika dilihat dari tahun 2015 rata-rata konsumsi per kapita seminggu tercatat sebanyak 1,631 kg dan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1,505 kg. Penurunan konsumsi terhadap beras ini disebabkan juga oleh diversifikasi pangan dari masyarakat yang menyebabkan harga beras menjadi mahal karena permintaan masyarakat terhadap beras sudah berkurang, meskipun konsumsi beras tetap lebih tinggi dibandingkan dengan produk pangan lainnya.

Polemik terkait impor beras terus menjadi permasalahan setiap tahunnya, kebijakan impor beras dari Indonesia tidak mungkin diberhentikan begitu saja. Seperti

⁹ M Taufiq AR Ruvananda, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 19, no. 2 (2022): 195–204.

¹⁰ M Taufiq AR Ruvananda, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia”.

Indonesia yang menyetujui MoU impor beras dengan Thailand pada Maret 2021. Perjanjian ini terkait nantinya sebagai antisipasi bagi Indonesia apabila produksi dalam negeri tidak mampu mencukupi cadangan beras di Bulog dan harga beras dunia tidak stabil sehingga Indonesia perlu mengimpor dari Thailand lebih kurang 1 juta ton setiap tahunnya hingga empat tahun mendatang.¹¹

Hal ini juga tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah di mana Indonesia tidak memerlukan impor beras, pada awal tahun 2021 pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan produksi Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya serta ketersediaan beras Bulog dinilai cukup yakni sebesar 1.395.376 ton pada 17 Mei 2021 yang terdiri juga dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1.378.047 ton. Stok beras ini juga melampaui target pemerintah di angka tersebut berada dalam batas aman stok beras nasional yaitu sebesar 1 juta ton sampai 1,5 juta ton, serta panen raya yang berlangsung dari awal tahun hingga bulan Mei yang berarti seharusnya Indonesia tidak perlu mengimpor beras hingga akhir tahun,¹² dan jika dilihat dari total produksi padi pada tahun 2020, Indonesia memproduksi sebanyak 55,53 juta ton, sedangkan Thailand hanya memproduksi 29,81 juta ton beras.¹³

¹¹ Kompas, “RI-Thailand Akan Teken MoU Impor Beras, Begini Penjelasan Mendag”, Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2021/03/19/203100026/ri-thailand-akan-teken-mou-impor-beras-begini-penjelasan-mendag?page=all> pada 02/Agustus/2022.

¹² CNN Indonesia, “Punya Stok 1,3 Juta Ton, Bulog Yakin Tak Ada Impor Beras 2021”, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210518094135-92-643629/punya-stok-13-juta-ton-bulog-yakin-tak-ada-impor-beras-2021> pada 16/Oktober/2022.

¹³ Katadata, “Ini Produksi Padi Negara-negara ASEAN Tahun 2020, Indonesia Terbesar” melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/15/ini-produksi-padi-negara-negara-asean-tahun-2020-indonesia-terbesar> pada 30/Oktober/2022.

Hal ini tentunya mendapatkan tantangan dari masyarakat terutama bekerja pada sektor tani terkait kesejahteraan mereka semakin sulit, dan menyebabkan kebijakan impor beras ini menimbulkan respon kontra dari masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang mendasari Indonesia mengimpor beras dari Thailand.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia masih belum bisa lepas dari impor beras, meskipun kuota impor Indonesia cukup fluktuatif dengan melihat kondisi produksi namun tidak berarti bahwa adanya upaya penurunan impor beras dari pemerintah. Meskipun diversifikasi pangan dari masyarakat sudah berjalan tetapi kebutuhan terhadap beras cukup tinggi sehingga pemerintah perlu menjaga kuota berasnya. Pada periode tahun 2016-2020, Thailand menjadi eksportir utama beras untuk Indonesia, impor beras ini tentu mengakibatkan pro dan kontra dari masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian, serta pertumbuhan produksi beras Indonesia sudah menunjukkan tren membaik pasca pandemi dan kemarau parah pada 2015 dan 2018, namun pemerintah masih melakukan impor dan juga menambah MoU terkait impor dengan Thailand pada Maret tahun 2021. Faktor yang mendasari Indonesia mengimpor beras dari Thailand ini menarik untuk diteliti.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti kemudian merumuskan pertanyaan penelitian yaitu “Apa faktor-faktor yang mendasari Indonesia mengimpor beras dari Thailand?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang faktor

utama yang mendasari Indonesia mengimpor beras dari Thailand tahun 2016-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian diharapkan memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hubungan internasional dan dapat membantu peneliti dan pembaca dalam memahami apa faktor-faktor negara dalam mengeluarkan kebijakan impor.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan bagi para pembuat kebijakan dan pemerintah Indonesia terkait pengimporan beras Indonesia dari negara lain.

1.6 Studi Pustaka

Dalam pembuatan penelitian ini, peneliti memakai beberapa sumber sebagai bahan acuan diantaranya: Sumber pertama yaitu berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia” yang ditulis oleh A. R. Ruvananda dan M. Taufiq.¹⁴ Pada artikel jurnal ini, Ruvananda dan Taufiq menjelaskan mengenai pengaruh dari produksi beras, konsumsi beras, kurs, dan harga beras lokal terhadap impor beras di Indonesia periode 2006 hingga 2020 dengan pendekatan kuantitatif. Di mana produksi beras secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia tahun 2006-2020, disebabkan produksi beras di Indonesia meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita yang mengarah pada peningkatan permintaan komoditas beras dalam negeri, namun impor

¹⁴ M Taufiq AR Ruvananda, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia”.

beras tidak terlalu tinggi karena diimbangi dengan produksi beras dalam negeri cukup tinggi. Lalu, konsumsi beras secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia tahun 2006-2020, disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan besarnya konsumsi beras membuat permintaan beras semakin meningkat yang mengharuskan untuk melakukan impor beras. Dari segi kurs secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia tahun 2006-2020, disebabkan karena nilai tukar merupakan prediktor terpenting dari harga beras impor yang akan disesuaikan dengan harga beras lokal, jika nilai tukar naik maka harga beras impor juga akan naik, yang berakibat pada turunnya permintaan impor beras sebagai akibatnya harga beras lokal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia tahun 2006-2020, dapat dilihat bahwa harga beras impor seringkali lebih murah daripada harga beras lokal, sehingga ketika harga beras lokal naik tetapi harga beras impor turun pada saat yang sama, masyarakat memilih untuk membeli beras impor yang relatif murah dibandingkan dengan beras lokal yang mahal. Serta secara simultan produksi beras, konsumsi beras, kurs, dan harga beras lokal berpengaruh terhadap impor beras di Indonesia pada tahun 2006-2020.

Artikel jurnal ini menjelaskan faktor-faktor yang akhirnya Indonesia lebih memilih untuk mengimpor beras sepanjang tahun 2006-2020, artikel jurnal ini menjadi acuan peneliti untuk menjelaskan pemilihan kebijakan impor Indonesia dari pandangan matematika-ekonomi. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah dari tahun yang diteliti, tulisan ini meneliti dari tahun 2006-2020 sedangkan peneliti meneliti dari tahun 2016-2021. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian ini menganalisis berdasarkan

pendekatan kuantitatif sedangkan peneliti dengan metode kualitatif dengan menggunakan menganalisis data-data yang terkait dengan impor beras Indonesia, serta tulisan ini lebih menjelaskan faktor-faktor mengapa Indonesia mengimpor beras secara keseluruhan sedangkan peneliti lebih melihat apa faktor-faktor Indonesia mengimpor beras dari Thailand.

Sumber selanjutnya dari Jamie S. Davidson yang berjudul “*Why the Philippines Chooses to Import Rice*”.¹⁵ Pada artikel jurnal ini membahas mengapa Filipina masih melakukan impor beras, jika dilihat dari segi historisnya mengapa Filipina masih mengimpor beras didasari tiga faktor utama yaitu kondisi geografis, sejarah kolonial, serta pesatnya perkembangan neoliberalisme. Tetapi, faktor yang paling berpengaruh berasal dari pemerintahan Filipina yang dinilai tidak mampu untuk mengkoordinasikan kegiatan perencanaan ekonomi sehingga mereka tidak lepas dari kegiatan impor. Para pendukung petani memegang juga teguh cita-cita negara mereka sebagai masyarakat agraris dan jika penerapan kebijakan pemerintah yang tepat nantinya akan mengakhiri dari ketergantungan beras impor. Mengingat kondisi daya saing sektor yang rendah saat ini, kombinasi dari biaya produksi yang tinggi, kurangnya investasi publik selama beberapa dekade, dan petani beras bersubsidi di negara-negara pengekspor, kubu (pendukung petani) ini percaya bahwa liberalisasi perdagangan beras negara tersebut akan menghancurkan jutaan petani kecil padi Filipina, karena tidak mampu bersaing dengan impor murah dari Thailand, Vietnam dan Myanmar.

¹⁵ Jamie S. Davidson, “Why the Philippines Chooses to Import Rice,” *Critical Asian Studies* 48, no. 1 (2016): 100–122.

Adapun temuan lain yang menyiratkan bahwa Filipina secara teratur mengimpor beras bukan karena apapun yang telah dilakukan orang Filipina, tetapi karena faktor struktural di luar kendali mereka. Serta terdapatnya alasan yang didorong oleh lembaga dibalik impor beras dihasilkan dari jaringan pilihan yang kompleks dan saling berhubungan yang dibuat oleh berbagai pemerintah Filipina dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga orientasi pengimporan beras tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, namun adanya alasan politik dibaliknya yang menyebabkan tidak bisa lepas dari impor beras.

Artikel jurnal ini menjadi rujukan peneliti terkait faktor-faktor Filipina melakukan impor beras, faktor sejarah serta kebijakan dan pengaruh politik lainnya menjadi penyebab Filipina tidak bisa lepas dari kegiatan impor beras, temuan tulisan ini membantu peneliti untuk bisa melihat apa faktor menyebabkan Indonesia memilih mengimpor beras dari Thailand. Perbedaan penelitian ini terletak dari objek yang diteliti, tulisan ini melihat secara keseluruhan mengapa Filipina melakukan impor beras, sedangkan peneliti lebih melihat ke faktor-faktor Indonesia mengimpor beras dari Thailand.

Sumber yang ketiga yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Fabian Pratama Kusumah dengan judul “Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019”¹⁶ Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan aktor pro dan kontra kebijakan impor beras dalam era pemerintahan Jokowi.

¹⁶ Fabian Pratama Kusumah, “Ekonomi Politik Dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019,” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 137.

Polemik impor beras yang terjadi pada era pemerintahan Jokowi tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus korupsi maupun kasus mafia pangan seperti pada kasus impor beras sebelum era pemerintahan Jokowi. Penerapan kebijakan pembatasan impor beras justru akan meningkatkan kemiskinan masyarakat karena harga beras lokal meningkat karena produksi yang tidak bisa mengimbangi konsumsi.

Negara yang bergantung memenuhi kebutuhan beras dalam negerinya dengan impor harus siap menerima resiko yang terjadi di pasar beras dunia yaitu ketersediaan stok beras yang tidak pasti serta terjadinya fluktuasi harga beras. Kebijakan impor beras dinilai sebagai kompetisi aktor untuk memenangkan kepentingannya. Dalam sebuah kebijakan yang diambil pemerintah, pasti didalamnya ada kepentingan-kepentingan yang berkompetisi. Suatu kebijakan impor dapat dipastikan ada pihak yang bertarung untuk memenangkan kepentingannya, tidak terkecuali pada kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Dalam artikel ini, peneliti tersebut percaya bahwa pemerintah memiliki kepentingan dan terjadi kontestasi kepentingan dalam kebijakan impor beras. Dalam era pemerintahan Joko Widodo, kebijakan impor beras mengalami beberapa kali polemik. Bahkan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan impor beras mengalami beberapa kali pergantian, sehingga kebijakan yang dilaksanakan pun tentu mengikuti oleh yang baru.

Artikel jurnal ini bermanfaat bagi peneliti untuk referensi terkait analisis pro dan kontra terkait kebijakan impor pemerintahan Presiden Jokowi pada periode pertama, serta melihat bahwa kebijakan impor juga melibatkan kepentingan lain dari pemangku kepentingan pemerintahan. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini

lebih melihat permasalahan impor secara keseluruhan dari segi politiknya, sedangkan peneliti hanya meneliti terkait impor beras Indonesia dari Thailand dan penelitian ini lebih melihat pemerintah Indonesia sebagai aktor atau subjek yang diteliti sedangkan peneliti memilih subjeknya negara Indonesia dan Thailand.

Sumber keempat yaitu buku yang ditulis oleh Bustanul Arifin berjudul “Ekonomi Beras Kontemporer: Data Baru, Tantangan Baru”.¹⁷ Fokus dari buku ini menjelaskan merangkum dari beberapa data beras yang terbaru dan Terdiri dari 13 bab yang menjelaskan secara komprehensif tentang perubahan ekonomi perak dan sifat kontemporer ekonomi beras, Buku ini secara rinci membahas mengenai dari sistem produksi beras keadaan stabilitas harga beras terkait perdagangan, investasi keberadaan ekonomi beras, tingkat konsumsi beras, implementasi perbaikan statistik beras dengan KSA, kebijakan yang dibentuk dalam era BPNT mengenai mitigasi dan adaptasi cuaca ekstrem, perubahan teknologi dalam produksi beras. Dalam buku ini telah tertera juga data statistik hal-hal yang terkait dalam perkembangan berat di Indonesia seperti jumlah dan daya produksi beras nasional, tingkat stabilitas harga beras setiap tahunnya, perubahan Bulog dalam kebijakan stabilitas harga, tingkat kesejahteraan masyarakat, data-data kerugian gagal produksi terkait permasalahan cuaca ekstrem di Indonesia serta buku ini juga memaparkan terkait beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh beras nasional.

Buku ini bermanfaat bagi peneliti karena telah mendukung data-data yang terbaru mengenai perkembangan beras di Indonesia dari aspek produksi, konsumsi,

¹⁷ Arifin, Bustanul. *Ekonomi Beras Kontemporer*. Gramedia Pustaka Utama, 2020.

kebijakan pemerintah dalam permasalahan beras dan data-data terbaru mengenai ancaman atau permasalahan produksi beras di Indonesia. Perbedaan pembahasan dari skripsi ini dengan buku ini yaitu buku ini menjelaskan terkait perkembangan beras nasional sedangkan peneliti melihat dari perkembangan beras ini untuk menganalisis mengapa Indonesia mengimpor beras dari Thailand.

Sumber kelima adalah artikel jurnal dari (John) Yeong –Sheng Tey dan Alias Radam yang berjudul “*Demand Patterns of Rice Imports in Malaysia: Implications for Food Security*”.¹⁸ Artikel jurnal ini menjelaskan terkait pola permintaan impor beras yang dilakukan Malaysia dalam ketahanan pangan negaranya. Lebih seperempat dari kebutuhan berasnya dipenuhi oleh impor, sehingga dampak dari kebijakan impor ini juga mempengaruhi bagi aspek stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Pasokan impor beras Malaysia ini dipegang oleh Vietnam dan Thailand. Krisis harga pangan pada tahun 2007-2008 telah melahirkan implikasi serius bagi ketahanan pangan, khususnya di antara negara-negara pengimpor beras. Terutama, harga beras pasca-krisis masih lebih tinggi dari harga sebelum krisis. Menanggapi hal ini, banyak negara Asia Tenggara telah mengubah kebijakan beras mereka ke arah untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor beras. Pemerintah Malaysia juga telah melaksanakan hal ini dengan memperkenalkan Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional pada puncak krisis harga pangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri, dengan target

¹⁸ Yeong Sheng Tey and Alias Radam, “Demand Patterns of Rice Imports in Malaysia: Implications for Food Security,” *Food Security* 3, no. 2 (2011): 253–261.

jangka pendek mencapai tingkat swasembada beras (SSL) sebesar 86% beras pada tahun 2010.

Sebagai negara importir beras, ketahanan pangan nasionalnya sebagian besar ditentukan oleh impor beras. Segala bentuk strategi dan kegiatan impor beras di Malaysia ini dijalankan oleh suatu kelompok perusahaan yang dikenal sebagai Padiberas Nasional Berhad (BERNAS). Menurut Economic Planning Unit, BERNAS adalah entitas korporat dari Lembaga Padi dan Beras Negara, yang dikelola oleh Departemen Pertanian pada tahun 1994. BERNAS diprivatisasi pada tahun 1996 dan terdaftar secara publik di 1997. Sejak transisi, BERNAS “mewarisi” fungsi komersial dan sosial Lembaga Padi dan Beras Negara. Adapun tugas BERNAS ini untuk (1) menjamin harga beras yang adil dan stabil, (2) menyediakan pasokan beras yang cukup, dan (3) menjamin mutu dan standar beras kepada konsumen. Itu juga melakukan bea masuk yang sebelumnya dikelola oleh dewan. Selanjutnya, diberikan hak eksklusif untuk mengimpor beras selama 15 tahun, hingga 2010 dengan perpanjangan opsional 5 tahun. Sehingga BERNAS memiliki peranan penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan beras di Malaysia.

Temuan dari artikel jurnal ini adalah Malaysia masih akan terus mengimpor beras dalam pemenuhan kuota beras nasionalnya karena dapat memenuhi seperempat dari kebutuhan beras tahunannya. Strategi impor yang diambil BERNAS menjadi penentu dalam ketahanan pangan negaranya. Berdasarkan estimasi elastisitas pengeluaran dan elastisitas harga secara konsisten menunjukkan bahwa beras lebih banyak bersumber dari Vietnam dan Thailand. Strategi ini menjadi hal ditinjau peneliti

ini dan menganjurkan untuk lebih menggunakan strategi multi-sumber dari beras yang diimpor dengan tujuan untuk menghindari krisis serta mengamankan pasokan beras dari pasar internasional. Kecenderungan masyarakat Malaysia untuk mengimpor beras juga terlihat dari mereka lebih menyukai nasi Vietnam daripada nasi Thailand, tetapi pemerintah perlu juga menjaga titik keseimbangan untuk menjaga keamanan pasokan nasional. Tulisan ini bermanfaat bagi peneliti dalam melihat bagaimana pola pengimporan beras suatu negara dan alasan kebijakan impor beras tetap dijalankan. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah dari subjek yang diteliti, tulisan ini melihat dari segi Malaysia sebagai negara importir beras, sedangkan peneliti melihat dari Indonesia. Selain itu perbedaan penelitian ini juga terletak pada tulisan ini menjelaskan pola negara Malaysia yang masih mengimpor beras untuk pemenuhan konsumsi nasionalnya, sedangkan peneliti meneliti faktor-faktor Indonesia mengimpor beras dari Thailand.

1.7 Kerangka Konseptual

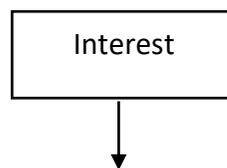
1.7.1 *State Behaviour*

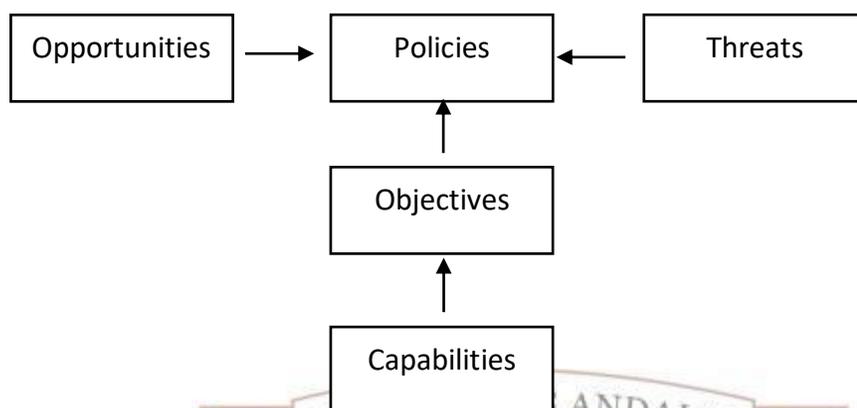
Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, maka peneliti akan menggunakan konsep *state behavior* yang dijelaskan oleh oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi dalam bukunya berjudul *International Relations and World Politics*.¹⁹ Dalam dinamika hubungan internasional dan berpolitik dunia, biasanya negara melakukan kerja sama dengan negara lain dalam melawan ancaman atau mencapai

¹⁹ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, "International Relations and World Politics", Fifth Edition, Pearson, USA, (2012).

tujuan nasionalnya. Sehingga terdapat beberapa indikator faktor pendorong suatu negara dalam merumuskan suatu kebijakan luar negerinya dalam mencapai tujuan nasional, yaitu memperhatikan peluang yang dimiliki (*opportunities*) dan tantangan atau ancaman yang dihadapi suatu negara (*threats*), serta kapabilitas yang dimiliki (*capabilities*) dan nantinya mengupayakan terwujudnya kepentingan nasional (*interest*) yang ingin dicapai. Hasil dari semua itu munculnya sebuah kebijakan (*policies*). Meskipun kepentingan nasional menjadi tujuan negara dalam membuat sebuah kebijakan, namun dalam merangkum semua faktor tadi diperlukan suatu objektivitas (*objectives*) terbangun dari kebijakan yang telah memperhatikan faktor peluang, ancaman, kepentingan nasional serta kapabilitas yang dimiliki dalam perumusan kebijakan tersebut.

Indikator-indikator ini saling berkesinambungan, jika suatu negara dapat melihat peluang serta bisa memanfaatkannya, maka tujuan nasionalnya dapat tercapai. Tetapi jika terdapat tantangan dalam meraihnya, suatu negara harus bisa memaksimalkan kapabilitas yang dimilikinya untuk meminimalisir hal tersebut dengan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dan sesuai serta memahami apa *objectives* yang ingin dicapai. Konsep ini dapat menjelaskan baik secara eksplisit maupun implisit bagi pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan kepentingan, tujuan, ancaman, dan peluang yang ada ketika menyusun dan melaksanakan suatu kebijakan. Untuk memahami konsep ini, dapat melalui bagan berikut:





Bagan 1. 1 State Behaviour

Sumber: Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, “International Relations and World Politics”, Fifth Edition, 2012

1. Interest

Kepentingan nasional merupakan landasan utama bagi sebuah negara dalam perumusan suatu kebijakan nasionalnya dan faktor utama negara dalam penunjukan sikap terhadap tindakan yang diambil terhadap negara lain. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan pertimbangan ideologis maupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan ekonomi.²⁰ Menurut Anak Agung Banyu Berwita dan Yanyan Mochamad Yani, konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Penganut realis menyamakan kepentingan nasional

²⁰ Papp, Daniel S, 1988. “Contemporary International Relations: A Framework for Understanding”, Second Editions, New York: MacMillan Publishing Company.

sebagai upaya negara untuk mengejar power atau kekuasaan.²¹ Dalam mencapai tujuan ini negara dapat meraihnya melalui teknik-teknik paksaan maupun kerja sama, karena bagaimanapun bentuk model kepemimpinan yang ada pastinya berusaha mengejar kepentingan untuk negaranya sendiri.²² Pembahasan mengenai kepentingan ini menyangkut dalam 3 hal yaitu mengenai *survival*, *economy vitality*, dan *core values*.

2. Threats

Ancaman yang dirasakan dalam sistem global tentu sangat mempengaruhi suatu negara dalam menentukan *objective nya*. Negara harus mampu memahami sejauh mana ancaman yang mungkin muncul akan benar-benar membahayakan kepentingan nasional. Ancaman ini juga bisa berasal dari dalam negara itu sendiri yang akhirnya dapat membahayakan bagi keamanan nasionalnya.

3. Opportunities

Dalam mencapai kepentingan nasional, adanya ancaman dan peluang dalam sistem global tentu mempengaruhi proses perumusan kebijakan suatu negara. Nilai dari sebuah peluang itu bersifat subjektif sehingga negara harus mampu melihat peluang yang ada serta mampu memanfaatkannya.

4. Capabilities

Faktor kapabilitas menjadi bagian terakhir dalam memformulasikan tujuan dari pembuatan kebijakan luar negeri selain didasari dengan apa kepentingan nasional,

²¹ Banyu Perwita, Anak A. dan Yanyan Mochamad Yani, 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

²² Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, "International Relations and World Politics".

ancaman, dan peluang yang dapat juga hadir dari sistem global. Negara harus mampu memahami kapabilitas atau bisa diartikan sebagai “kekuatan” yang dimilikinya yang nantinya akan berguna untuk mencapai dan melindungi kepentingan mereka.

5. Objectives

Pembahasan dari tujuan nasional ini selaras dengan apa yang tertera pada dasar perumusan pembentukan suatu negara, sehingga pembahasan mengenai tujuan nasional ini bersifat lebih umum, pemahaman mengenai tujuan nasional ini bisa dilihat dari spektrum waktu seperti apakah tujuan kebijakan ini untuk jangka pendek (*short term*), jangka menengah (*mid term*) dan ataupun untuk jangka panjang (*long term*).

Terkait pengimporan beras yang dilakukan Indonesia dari Thailand hingga penambahan kontrak kerja sama impor baru pada tahun 2021, peneliti melihat dengan menganalisis indikator-indikator tersebut bisa menjawab alasan bagaimana faktor utama Indonesia dengan melihat hasil pertimbangan dari aspek kepentingan, ancaman dan tantangan yang ada, peluang dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia dalam mengadakan kebijakan impor tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga penelitian ini sangat mementingkan proses, peristiwa dan

orientasi²³. Dalam penelitian kualitatif sering melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit, sehingga hal yang biasa dilakukan adalah bergelut dengan berbagai analisis tematik.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Penelitian dengan model deskriptif-analisis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini berguna untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang telah ataupun sedang terjadi dengan menggunakan data yang bersifat deskriptif seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel lainnya yang berhubungan agar dapat lebih memahami secara mendalam mengenai kejadian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi peneliti agar tidak meluas dan keluar dari apa yang dimaksud. Peneliti membatasi penelitian ini dari Januari 2016- Mei 2021. Hal ini dikarenakan peneliti melihat pada tahun 2016, Indonesia mulai beralih memilih Thailand sebagai negara pemasok beras impor utamanya yang pada tahun-tahun sebelumnya didominasi dari Vietnam. Kemudian pada tahun 2021 Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Thailand (MoU) untuk kerjasama terkait impor beras dari Thailand.

1.8.3 Unit Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek yang perilakunya dianalisis dan diteliti. Oleh sebab itu yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini

²³ Somantri Rusliwa G, Memahami Metode Kualitatif. Depok: FISIP Universitas Indonesia, 2005

adalah Indonesia dan Thailand dalam periode tahun 2016-2021. Kemudian, unit eksplanasi dalam penelitian yaitu unit yang mendapatkan dampak dari unit analisis yang hendak kita teliti. Dengan demikian yang menjadi unit eksplanasi dari penelitian ini adalah faktor-faktor Indonesia mengimpor beras dari Thailand .

1.8.4 Tingkat Analisis

Tingkat analisis merupakan tingkat atau posisi para aktor yang menjadi objek kajian berinteraksi dalam masalah penelitian. Pada penelitian ini tingkat analisis berada pada level negara yaitu Indonesia dan Thailand.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melalui studi pustaka (studi literatur). Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data-data dari sumber yang berbentuk literatur akademik berupa; buku, artikel, jurnal, berita, dan website sehingga bersifat sekunder atau tidak langsung di mana tidak memerlukan riset lapangan. Literatur akademik yang dipakai pada penelitian ini memiliki pembahasan seputar kondisi perkembangan produksi beras Indonesia dan Thailand, kebijakan impor beras Indonesia dengan Thailand serta kerja sama yang dijalin Indonesia Thailand dalam periode 2016-2021. Peneliti juga menggunakan data-data dari lembaga pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai data impor beras Indonesia pada tahun 2016-2021, data dari Kementerian Pertanian (Kementan RI) mengenai produksi, distribusi, dan kebijakan beras di Indonesia dan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag RI) tentang kegiatan ekspor impor yang terjalin antara Indonesia dan Thailand. Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data

atau fakta sejarah yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.²⁴

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan berhubungan dengan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu bersifat kualitatif, yang di mana data yang digunakan bukan berbentuk angka atau numeric melainkan berbentuk analisis data yang dikumpulkan melalui data-data yang relevan yang telah diseleksi sesuai kelompok permasalahan dan kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Analisis data kualitatif adalah identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman menjelaskan 3 tahapan dalam menganalisis data:²⁵

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, memusatkan, atau mengabstraksi data yang muncul dari berbagai sumber empiris. Dalam penelitian ini, kondensasi data akan dilakukan dengan menggunakan kata kunci produksi beras, kebijakan impor beras, kerjasama yang dijalin Indonesia dengan Thailand dalam proses pencarian data agar dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Penyajian data

Setelah membaca dokumen yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, peneliti akan mengambil data penting dari bahan bacaan tersebut kemudian

²⁴ M.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal 27

²⁵ Mathew B Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, SAGE PUBLICATION, 1994.

melakukan paraphrase serta melakukan analisis terhadap bahan bacaan yang telah dikumpulkan. Untuk memulai penelitian, peneliti akan mendeskripsikan kondisi produksi beras di Indonesia dan kendala yang dihadapi, sehingga kemudian bagaimana Indonesia mengambil kebijakan untuk mengimpor beras dari Thailand. Dari hal tersebut, peneliti akan mendeskripsikan faktor-faktor Indonesia memilih mengimpor beras dari Thailand Indonesia dengan melihat dari beberapa faktor.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah proses penyajian data yang berupa hasil analisis peneliti dan dari pengaplikasian konsep penelitian, peneliti akan menyimpulkan dan melakukan verifikasi terhadap penelitian tersebut guna memastikan bahwa kerangka konsep yang digunakan dapat menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian (pendekatan penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), serta termasuk sistematika penulisan.

BAB II Kondisi Pangan Indonesia dan Kebijakan Impor Beras Indonesia

Pada bab ini, pembahasan dibagi menjadi tiga sub-bab. Sub-bab

pertama membahas kondisi komoditas beras di Indonesia. Sub-bab kedua membahas kebijakan impor beras yang diterapkan Indonesia. Sub-bab ketiga mengkaji dampak kebijakan impor beras bagi masyarakat secara umum. Penjelasan ini penting untuk memahami kondisi produksi dan ketahanan beras di Indonesia, serta dampak impor dari negara-negara seperti Thailand terhadap masyarakat.

BAB III

Impor Beras Thailand di Indonesia

Pada bab ini, dijelaskan melalui dua pembahasan mengenai impor beras Thailand di Indonesia. Pertama, dibahas sejarah perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand sejak tahun 1950. Kedua, dibahas potensi Thailand sebagai negara pengekspor beras ke Indonesia serta perkembangan impor beras Indonesia dari Thailand, termasuk alasan di balik ketergantungan impor tersebut.

BAB IV

Analisis Faktor-faktor Indonesia Mengimpor Beras dari Thailand 2016-2021

Dalam bab ini akan dianalisis apa saja faktor-faktor Indonesia mengimpor beras dari Thailand menggunakan indikator konsep *state behavior* oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi dengan melihat pertimbangan dari aspek kepentingan, ancaman, peluang, kapabilitas, objektivitas sehingga Indonesia memutuskan untuk mengimpor beras dari Thailand.

BAB V

Penutup

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan akhir yang juga mencakup hasil dari penelitian yang sudah dibahas di bab sebelumnya mengenai faktor-faktor apa yang melandasi Indonesia memilih mengimpor beras dari Thailand pada tahun 2016-2021.

